

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana bidang pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran bidang pertanian diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa bagi negara. Bidang pertanian memberikan kontribusi terhadap PDB tahun 2018 sebesar 1900,4 triliun rupiah (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Tingginya potensi di bidang pertanian menjadi pendorong bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang lebih intensif. Hal ini dibutuhkan mengingat ketahanan pangan nasional merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional (Azriani, Refdinal dan Cindy, 2018).

Proses pembangunan pertanian, perbaikan mutu hidup yang diinginkan dicapai melalui upaya peningkatan produktivitas usahatani, yakni semakin memperbesar turutnya campur tangan petani berupa tenaga, pikiran, keterampilan dan berbagai macam modal yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Dengan kata lain, di dalam pembangunan pertanian dituntut adanya perubahan perilaku petani sebagai syarat tercapainya peningkatan produktivitas usahatani dan perbaikan mutu hidupnya. Pembangunan pertanian sebagai salah satu sub sistem pembangunan nasional, harus selalu memperhatikan dan dapat menunjang pembangunan wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional harus memperhatikan potensi wilayah yang seimbang untuk kepentingan sektor pertanian itu sendiri maupun untuk kepentingan wilayah yang bersangkutan (Jafar Hafsah, 2009).

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah yang sedang melakukan akselerasi pembangunan dengan memfokuskan diri pada tiga masalah pokok pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan, penataan destinasi pariwisata, dan peningkatan produktivitas pertanian. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani (Ade Sugianto, 2018). Selain itu, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap jumlah total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut (BPS Kab. Tasikmalaya, 2018).

Salah satu sektor pertanian yang menjadi fokus pemerintah dalam melakukan pembangunan pertanian adalah sektor tanaman pangan. Target utama pembangunan tanaman pangan difokuskan pada pembangunan tujuh komoditas yang menjadi unggulan nasional seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu (Ariningsih, 2015).

Usahatani padi termasuk salah satu jenis usaha yang risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Sumber risiko dan ketidakpastian yang sifatnya eksternal (tidak dapat dikendalikan oleh petani) berasal dari lingkungan alam terutama iklim, bencana alam, ataupun organisme pengganggu tanaman serta lingkungan sosial ekonomi. Berbagai risiko yang dihadapi sektor pertanian tersebut dapat berdampak pada stabilitas pendapatan petani. Dalam rangka meminimalisasi resiko tersebut, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada petani yang berperan dalam pembangunan sektor pertanian. Salah satu bentuk perlindungan terhadap petani yaitu asuransi pertanian (Azriani, Refdinal dan Cindy, 2018).

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usahatani (khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan). Asuransi pertanian merupakan salah satu komponen dari seluruh kebijakan dan strategi pencapaian swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Program asuransi pertanian tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (P3). Pada pasal 12 ayat 2 disebutkan petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap paling luas dua hektar, petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar, serta petani hortikultura, pekebun dan peternak skala usaha kecil. Asuransi yang diberlakukan untuk petani yang melakukan produksi padi yaitu asuransi usahatani padi atau yang lebih dikenal dengan sebutan AOTP (Andi, Syahyuti, Sumaryanto dan Ismeth, 2018).

Penerapan sistem AOTP oleh pemerintah dinilai memberikan manfaat positif terhadap para petani. Dengan adanya AOTP, petani dapat meminimalisasi

kerugian yang terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit, sehingga petani masih dapat melakukan kegiatan produksi padi pada musim tanam yang akan datang. kredibilitas petani dimata perbankan juga menjadi lebih baik sehingga membuka peluang dan kemudahan untuk memperoleh kredit usahatani. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan premi senilai Rp 144.000,00 per hektar per musim tanam. Dengan demikian petani hanya membayar premi senilai Rp 36.000,00 per hektar per musim tanam (Kementerian Pertanian, 2018).

Meskipun kebijakan AUTP memiliki manfaat yang besar untuk petani, tetapi pelaksanaan AUTP di Kabupaten Tasikmalaya belum mencapai target. Jumlah lahan sawah yang menjadi target AUTP sampai tahun 2018 seluas 10.000 ha (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya, 2017). Sedangkan yang terealisasi baru sekitar 66 persen dari total target yaitu seluas 6.618,208 ha (PT Jasindo, 2019). Dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan dengan luas lahan terkecil yang diasuransikan yaitu Kecamatan Parungponteng. Satu satunya desa yang petaninya sudah mendaftar menjadi peserta AUTP adalah Desa Cigunung. Dari tahun 2017 sampai sekarang, belum ada penambahan peserta yang terdaftar sebagai peserta AUTP. Jumlah peserta yang terdaftar hanya tiga orang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Petani Mengikuti Asuransi Usahatani Padi di Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan alinea latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran kurangnya pengetahuan AUTP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUTP, lahan dan kurangnya peran penyuluh di Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana gambaran keengganan petani mengikuti asuransi usahatani padi?
3. Bagaimana pengaruh kurangnya pengetahuan AUTP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUTP, lahan dan kurangnya peran penyuluh terhadap keengganan petani mengikuti asuransi usahatani padi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui gambaran kurangnya pengetahuan AUTP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUTP, lahan dan kurangnya peran penyuluh di Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.
2. Mengetahui gambaran keengganan petani mengikuti asuransi usahatani padi.
3. Mengetahui pengaruh kurangnya pengetahuan AUTP, tingkat pendidikan, pendapatan, premi asuransi, klaim AUTP, lahan dan kurangnya peran penyuluh terhadap keengganan petani mengikuti asuransi usahatani padi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti, sebagai pengetahuan dan wawasan serta pemahaman mengenai karakteristik petani padi yang tidak mengikuti asuransi usahatani padi di Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng dan faktor-faktor yang mempengaruhi petani tidak mengikuti AUTP.
2. Pembaca, sebagai informasi yang dapat di jadikan dasar untuk melakukan penelitian lebih luas mengenai asuransi pertanian.
3. Pemerintah, sebagai informasi yang dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi untuk mengoptimalkan realisasi AUTP di Desa Cigunung Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.